

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pembentukan Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional atau LDKPI adalah salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk meningkatkan perannya sebagai negara donor dan menjalankan ‘diplomasi tangan di atas’. Pada saat yang bersamaan, praktik pemberian bantuan luar negeri juga kemudian menjadi salah satu alat untuk mencapai kepentingan Indonesia, termasuk dalam aspek ekonomi. Hal ini tercantum pada salah satu visi dari LDKPI yaitu bantuan luar negeri untuk mendukung pemberdayaan ekonomi nasional.

Dalam penyaluran bantuan luar negerinya, Indonesia melalui LDKPI banyak memberikan bantuan kepada negara-negara di kawasan Pasifik. Dalam laporan alokasi dana bantuan LDKPI, Fiji merupakan negara yang menerima bantuan dalam jumlah paling besar dari Indonesia. Fiji sendiri salah satu negara yang merupakan mitra dagang strategis Indonesia serta negara yang memiliki perekonomian paling maju di kawasan Pasifik. Hal inilah yang kemudian menjadi landasan dan titik awal dari pertanyaan penelitian ini yang melihat bahwa bantuan luar negeri Indonesia kepada Fiji memiliki motif ekonomi di dalamnya.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Indonesia memiliki motif ekonomi dalam pemberian bantuan luar negerinya kepada Fiji, yaitu menjadikan bantuan luar negeri sebagai sarana untuk memperluas atau ekspansi pasar ke Fiji sebagai pasar non-

tradisional serta sebagai upaya untuk mempromosikan bisnis domestiknya. Hal ini sejalan dengan strategi diplomasi ekonomi yang digaungkan pada era pemerintahan Joko Widodo. Salah satu implikasi dari diplomasi ekonomi ini adalah untuk memperluas perdagangan Indonesia ke pasar non-tradisional. Di kawasan Pasifik, Fiji merupakan mitra dagang Indonesia dan juga memiliki posisi yang strategis sebagai *hub* atau penghubung arus barang kepada negara Pasifik lainnya. Selain itu, pemberian hibah yang diberikan Indonesia kepada Fiji juga pada akhirnya mencerminkan kepentingan ekonomi Indonesia, karena hibah yang diberikan tersebut digunakan untuk membeli barang-barang yang berasal dari produsen sektor farmasi asal Indonesia berupa obat-obatan dan juga alat kesehatan. Pengadaan barang dari bisnis domestik dalam penyaluran bantuan luar negeri diharapkan dapat menciptakan *multiplier effect*, dimana pemberian bantuan dalam bentuk alat kesehatan dan juga obat ini dapat menjadi jalan pembuka bagi perusahaan sektor farmasi asal Indonesia yang ingin melakukan ekspansi bisnis dan melakukan ekspor ke Fiji.

Pemberian bantuan luar negeri Indonesia kepada Fiji yang didorong oleh motif ekonomi mengisyaratkan bahwa motif negara donor dapat berubah dari waktu ke waktu. Pada studi kasus tersebut, Indonesia seringkali dianggap memberikan bantuan ke kawasan Pasifik, khususnya Fiji dengan alasan isu Papua. Namun, diluar hal tersebut Indonesia ternyata memiliki memiliki motivasi untuk mencapai kepentingannya. Hal ini menggambarkan bagaimana konstelasi hubungan internasional bersifat dinamis yang terkadang tidak dapat dianalisa menggunakan sebuah teori atau konsep tunggal.

4.2 Saran

Dalam penulisannya, penelitian ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama, kurang mendalamnya pemaparan aktor bisnis domestik dikarenakan minimnya transparansi serta adanya hambatan untuk mengakses data yang tidak tersedia untuk publik. Kedua, LDKPI merupakan lembaga yang dapat dikatakan cenderung masih baru terbentuk. Hal ini menyebabkan masih minimnya regulasi terhadap beberapa aspek, seperti aspek evaluasi dan juga monitoring untuk melihat sejauh mana pemberian bantuan luar negeri sejalan dan dapat mencapai tujuan politik luar negeri Indonesia (HI UGM, 2022).

Maka dari itu, saran penulis untuk penelitian berikutnya adalah untuk melakukan penelitian yang berfokus pada bagaimana dampak dan efektivitas dari bantuan luar negeri serta sejauh mana strategi ini sejalan dengan pembangunan ekonomi dan politik luar negeri Indonesia. Hal ini menjadi penting untuk diteliti Indonesia menjadikan pemberian bantuan luar negeri melalui LDKPI sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan dari politik luar negerinya.

Tulisan ini menawarkan beberapa rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Republik Indonesia. Pertama, dilakukannya intensifikasi koordinasi kemitraan strategis dengan perusahaan swasta dan lembaga terkait. Kedua, yaitu perumusan regulasi terkait evaluasi dan monitoring bantuan luar negeri Indonesia. Hal ini bertujuan agar bantuan luar negeri Indonesia memiliki *outcome* yang lebih terukur dan sejalan dengan tujuan dibentuknya LDKPI, yaitu untuk mencapai kepentingan Indonesia.